

Lagu “ABC (Ada Banyak Cara)” Karya Trio Bimbo Dalam Analisis Wacana Michel Foucault

Ubaidillah

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

Alamat email: oeby_06@yahoo.com

Abstract

This paper examines a song criticizing the phenomenon that occurs in the body of the government of Indonesia nowadays. Lyric of a song “ABC (Ada Banyak Cara)” by Trio Bimbo that becomes the focus of study in this paper is interesting to be studied, considering the Trio Bimbo is famous musicians who focused on religious themes, voicing out his heart in criticizing the government. The discourse theory of Michel Foucault, in which his discourse of language is closely related to who is in power in the region, is used to analyze this song. The result founds that the discourse of language in the ABC song is representation the mercy of the people, in this case represented by Trio Bimbo sound, such as naikkan gaji sendiri, duduk sidang terus mimpi, jaksa hakim wiraswasta, and other discordant expressions that criticize the government. Trio Bimbo does not hesitate to cast his criticism of the government by voicing the discourse of language which is considered as a direct criticism, without the subtle innuendo. If this happens in the Orde Baru era, the discourse of language must be prohibited by the government, because they were in power at that time. However, after the fall of Orde Baru, resime people have the power to create their own linguistic discourse.

Keywords: Lagu ABC, language discourse, and power

Pendahuluan

Keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kian memanas akhir-akhir ini, baik dari sisi agama, sosial, politik, dan hukum banyak membuat semua orang berkomentar tentangnya. Baik melalui dialog-dialog di televisi dan radio oleh para pengamat ahli, maupun melalui opini-opini yang ditulis di media cetak. Selain itu, para musisi pun turut andil menyurakan perasaan hatinya mengenai

keadaan bangsa tercinta ini.

Berbagai musisi dari segala aliran banyak yang mengomentari aneka rupa wajah Indonesia melalui lirik-lirik lagu mereka. Hingga sekarang misalnya Iwan Fals, Ebit G. Ade, Slank Band, dll. Bahkan, musisi balada yang beraliran religi seperti Trio Bimbo pun turut mewarnai blantika musik Indonesia untuk menyuarakan isi hatinya mengenai wajah negeri ini. Lagunya yang baru dirilis pertengahan

Februari 2011 dengan judul ABC (Ada Banyak Cara), menggambarkan kegundahan masyarakat atas situasi bangsa ini akibat banyaknya kasus-kasus hukum tak terselesaikan. Tak ayal, bahasa yang digunakan oleh musisi asal Bandung ini membuat kuping para pejabat “panas”. Meskipun demikian, di zaman reformasi seperti saat ini, menyuarakan jeritan hati rakyat bukanlah suatu tindak pidana dan tangan-tangan pemerintah tidak mampu menjamahnya. Ini menggambarkan bahwa kekuasaan dalam menciptakan sebuah wacana terletak di tangan rakyat.

Berbeda halnya pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk mengkonstruksi simbol-simbol dan wacana bahasa harus sesuai dengan yang diinginkan oleh penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah. Foucault, seorang tokoh poststrukturalis yang selalu mengaitkan wacana dengan kekuasaan, benar-benar percaya akan kemampuan yang dimiliki penguasa dalam mengkonstruksi serta menciptakan subjek-subjek tertentu melalui kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan, dalam sejarah panggung politik di Indonesia, sejak era Orde Baru, praktik serupa juga tampak dipraktikkan. Lewat penciptaan simbol dan wacana tertentu, pemerintah Orde Baru ketika itu benar-benar memanfaatkan sarana bahasa Indonesia sebagai media efektif dalam rangka mengendalikan dan mempertahankan kekuasaannya.¹

Melihat perbedaan kekuasaan dalam menentukan wacana pada masa pemerintahan Orde Baru dan Reformasi di atas, penulis tertarik untuk mengkaji wacana bahasa yang digunakan oleh “rakyat”, dalam hal ini diwakili oleh Trio Bimbo, selaku pemegang penuh kekuasaan dalam mengkonstruksi sebuah wacana.

Tulisan ini akan menguraikan bait per bait yang ada pada lirik lagu “Ada Banyak Cara” karya Trio Bimbo dengan menerapkan analisis wacana Michel Foucault, seorang tokoh poststrukturalis yang selalu mengaitkan wacana dengan kekuasaan. Dengan model analisis wacana ini, penulis berusaha mendeskripsikan representasi wajah Indonesia yang terdapat dalam lirik lagu ABC sebagai sebuah wacana yang agaknya merupakan hasil kekuasaan rakyat, bukan hasil kekuasaan pemerintah.

Teori Wacana Michel Foucault

Sebelum membicarakan teori wacana Michel Foucault, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian esensial tentang wacana. Istilah wacana (*discourse*) yang berasal dari bahasa Latin, *discursus*, yang artinya ‘lari kian-kemari’, merupakan satuan kebahasaan terlengkap dan tertinggi yang berada di atas kalimat yang dapat direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap.² Melalui pendekatan wacana, pesan-pesan komunikasi, seperti kata-kata, tulisan, gambar-gambar, dan lain-lain, eksistensinya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya. Tidak hanya itu, konteks peristiwa yang berkenaan dengannya, situasi masyarakat luas yang melatarbelakangi keberadaannya, dan lain-lain juga ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya. Kesemuanya itu dapat berupa nilai-nilai, ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan, dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan analisis wacana, dalam arti paling sederhana, adalah kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat. Lazimnya, perluasan arti istilah ini dikaitkan dengan konteks lebih

¹ Moch. Jalal, “Praktik Diskursif *the Theory of Thruth* Michel Foucault dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa Indonesia. Dalam <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Praktik%20Diskursif.pdf>

² Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik* (Jakarta: PT Gramedia, 2001), hlm. 231.

luas yang memengaruhi makna rangkaian ungkapan secara keseluruhan. Para analis wacana mengkaji bagian lebih besar bahasa ketika mereka saling bertautan. Beberapa analis wacana mempertimbangkan konteks yang lebih luas lagi untuk memahami bagaimana konteks itu memengaruhi makna kalimat.³ Menganalisis wacana berarti bekerja dengan menginterpretasikan atau menafsirkan arti yang dimaksudkan oleh penutur atau penulisnya ketika membuat wacana, bukan merupakan penerjemahan langsung dari arti kalimat.⁴

Sebagai sebuah disiplin ilmu, analisis wacana memiliki latar belakang dan acuan teoretis yang beragam. Paling tidak, ada dua model analisis wacana yang berkembang dan banyak dipakai oleh para peneliti. *Pertama*, adalah model analisis yang terutama ditujukan ke arah wacana itu sendiri, bergerak ke dalam dengan mencari kohesi dan koherensi strukturnya. *Kedua*, analisis wacana yang tidak hanya dibatasi pada pemahaman mengenai kohesi dan koherensi strukturnya, melainkan ditujukan pada efeknya, pada kemampuannya memengaruhi dan membentuk pikiran atau perilaku kolektif manusia. Model analisis pertama berkembang dalam disiplin linguistik, sementara model kedua adalah analisis wacana yang dikembangkan oleh Michel Foucault, Sara Mills, Teun A. Van Dijk, Roger Fowler dan sebagainya.⁵

Michel Foucault adalah seorang

pemikir poststrukturalisme yang mengagagas teori wacana dengan melampaui pemikiran strukturalisme tentang bagaimana sebuah wacana terbentuk. Jika menurut strukturalisme, sebuah wacana terbentuk dari keterkaitan yang baik antara kohesi dan koherensi dalam kalimat, maka menurut Foucault, sebuah wacana merupakan produk dari relasi kekuasaan dengan pengetahuan. Untuk itu, penulis akan memulai pembahasan teori wacana dari asumsi Foucault tentang kekuasaan.

Secara tradisional, kekuasaan kerap dipandang sebagai kemampuan atau kekuatan pihak tertentu untuk menguasai pihak yang lemah. Misal saja kekuasaan raja atau pemerintah kepada rakyatnya. Kekuasaan di sini tentu bersifat negatif. Namun, Foucault justru memandang kekuasaan bersifat positif dan produktif.⁶

Berbeda dengan konsep kekuasaan yang umum, yakni yang dimiliki oleh pihak-pihak yang kuat terhadap yang lemah, kekuasaan bagi Foucault seperti yang diuraikan dalam bukunya *Power/ Knowledge* bukanlah merupakan suatu entitas atau kapasitas yang dapat dimiliki oleh satu orang atau lembaga, melainkan dapat diibaratkan dengan sebuah jaringan yang tersebar dimana-mana. Jadi, kekuasaan tidak datang secara vertikal dari penguasa terhadap yang ditindas, dari pemerintah ke rakyat, melainkan datang dari semua lapisan masyarakat, ke segala arah.⁷

Penulis memahami bahwa kekuasaan menurut Foucault tidak lagi dimaknai

³ Mudjio Rahardjo, «Analisis Wacana dalam Studi Keislaman» dalam http://mudjjarahardjo.com/artikel/230-analisis-wacana-dalam-studi-keislaman-sebuah-pengantar-awal.html#_ftn8 diakses tanggal 31 Desember 2010.

⁴ Gillian Brown dan George Yule. *Analisis Wacana*. Terjemah *Discourse Analysis* oleh I Sutikno (Jakarta: PT Gramedia, 1996) hlm. 114.

⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 23.

⁶ Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terjemahan oleh Moechtar Zoerni dari buku asli *The Archeology of Knowledge*, Yogyakarta: Qalam, 2002, hlm. ix.

⁷ Melani Budianta, "Teori Sastra Sesudah Strukturalisme dari Studi Teks ke Studi Wacana Budaya", artikel dalam Bahan Pelatihan Teori dan Kritik Sastra, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, hal. 49

secara vertikal dari atas ke bawah, atau dari institusi penguasa kepada individu yang dikuasai, melainkan bahwa kekuasaan datang dari semua lapisan tetapi ia menyebar secara kompleks kepada segenap individu sebagai subjek yang kecil, dan menyebabkan praktik kuasa ada di mana-mana.

Foucault kemudian mengaitkan bahwa praktik kekuasaan inilah yang kemudian memengaruhi pengetahuan manusia tentang "kebenaran". Dalam artian, apa yang manusia anggap sebagai "kebenaran", merupakan hasil dari relasi-relasi kekuasaan yang membentuk sistem pengetahuan manusia tentang "kebenaran" itu sendiri. Foucault, seperti yang dikutip Mh. Nurul Huda, berpendapat bahwa:

Kebenaran tidak berada di luar kekuasaan. Kebenaran selalu terkait dengan relasi kekuasaan dalam ranah sosial dan politik. Kebenaran diproduksi melalui banyak cara dan dalam aneka praktek kehidupan manusia sebagai cara mengatur diri mereka dan orang lain. Karena itu, setiap produksi pengetahuan sesungguhnya memuat rezim kebenaran. Dengan demikian, kekuasaan pun bersifat konstitutif dalam pengetahuan, sehingga kekuasaan sebenarnya tersebar pada seluruh level masyarakat dan bermacam relasi sosial.⁸

Penulis memahami penjelasan di atas bahwa, lewat relasi kekuasaan yang menyebar itulah manusia membuat atau memproduksi sistem atas suatu pengetahuan tertentu yang tidak lagi dipertanyakan orang, hingga dianggap sebagai suatu "kebenaran". Maka, jelas bahwa kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan manusia, dan produksi pengetahuan manusia

sesungguhnya memuat rezim 'kebenaran'. Dalam rangka inilah Foucault menempatkan wacana (*discourse*; diskursus) sebagai praktik yang terbentuk dari relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan.

Menurut Foucault, seperti yang ditulis Melani Budianta, kekuasaan mewujudkan diri melalui wacana dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah melalui prosedur menyeleksi atau memisahkan mana yang dianggap layak dan yang tidak layak; dengan memberlakukan sejumlah pelarangan terhadap beberapa jenis wacana; dengan membedakan apa yang disebut benar dan salah.⁹

Mengenai kaitan antara kekuasaan dengan pengetahuan dalam sebuah wacana, Eriyanto juga berkomentar demikian:

Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran disini, oleh Foucault tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang dari langit...akan tetapi, ia diproduksi, setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui mana khalayak digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut. Di sini, setiap kekuasaan selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran tertentu yang disebarkan lewat wacana yang dibentuk oleh kekuasaan.¹⁰

Menurut penulis hal tersebut adalah kebenaran atau pengetahuan manusia yang tercermin dalam sebuah wacana, sangat ditentukan dari praktik-praktik kekuasaan yang melingkari manusia itu sendiri. Apa yang dianggap benar dan yang dianggap salah oleh manusia, merupakan wacana sebagai hasil dari relasi kekuasaan dengan pengetahuan. Untuk itu, penulis

⁸ Mh. Nurul Huda, "Ideologi Sebagai Praktek Kebudayaan", artikel dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, Edisi Th.XXVII No.3/2004, hal.53

⁹ Melani Budianta, *op.cit.*, hlm. 48

¹⁰ Eriyanto, *op.cit.*, hlm. 66-67

menyimpulkan bahwa wacana merupakan cara menghasilkan pengetahuan, praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di baliknya, dan kesalingberkaitan di antara semua aspek ini.

Lirik Lagu ABC (Ada Banyak Cara) karya Trio Bimbo dalam Analisis Wacana Michel Foucault

Lagu ABC yang dilantunkan oleh Trio Bimbo, musisi yang sebelumnya hanya menciptakan lagu-lagu religi, sungguh membuat oknum pemerintahan di negeri ini merasa tersentil. Dan, rakyat pun merasa kagum dengan keberanian Trio Bimbo dalam lirik lagu tersebut yang dianggap juga ikut menyuarakan jerit hati mereka. Berikut lirik lagu ABC karya Trio Bimbo yang dianggap menyentil para oknum pemerintah tersebut.

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
untuk jadi wakil rakyat,
salah satunya kurang peka perasaan*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
jadi pelawak politik, salah satunya
sering naikkan gaji sendiri*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
untuk disebut politisi,
salah satunya duduk sidang terus mimpi*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
untuk pamer kekuasaan,
salah satunya usir KPK dari senayan*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
untuk menjadi mafia,
salah satunya memakai wig dan kacamata*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
jaksa hakim wiraswata,
salah satunya mengurus kantong terdakwa*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
jadi pengacara terpuji,
salah satunya menyeringai tarifnya tinggi*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
menyelamatkan Indonesia,
salah satunya sembuhkan elit yang sakit jiwa*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
polisi jadi teladan,
akal-akalan jadi kehilangan akal
akal-akalan jadi kehilangan akal*

Sembilan bait pada lagu ABC karya Trio Bimbo di atas, cukup mewakili rakyat dalam menyuarakan jerit hati mereka atas ketidakpuasan terhadap pemerintah dari berbagai jajaran, tidak hanya eksekutif, legislatif juga yudikatif mendapat sentilan yang seharusnya cukup membuat kuping mereka panas. Pada bait pertama hingga keempat, Trio Bimbo menyentil kalangan legislatif dalam hal ini para wakil rakyat yang menurutnya tidak merepresentasikan eksistensi mereka sebagai wakil rakyat yang harus menyuarakan aspirasi rakyat. Dalam bahasanya, Trio Bimbo mengatakan

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
untuk jadi wakil rakyat,
salah satunya kurang peka perasaan*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
jadi pelawak politik,
salah satunya sering naikkan gaji sendiri*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
untuk disebut politisi,
salah satunya duduk sidang terus mimpi*

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
untuk pamer kekuasaan,
salah satunya usir KPK dari senayan*

Pada bait pertama dikatakan bahwa salah satu cara untuk menjadi wakil rakyat adalah *kurang peka perasaan*. Dalam bait ini, frase *kurang peka perasaan* inilah yang menjadi sentilan bagi para wakil rakyat yang berkantor di Senayan. Ungkapan ini sama sekali tidak mendapat respon balik dari pemerintah, khususnya para wakil rakyat dan masyarakat. Dan, hukum pun tidak mampu membelenggu tangan-tangan sang pencipta lagu meskipun bahasa yang digunakan cukup menelanjangi kebobrokan wakil rakyat di negeri ini. Melihat fakta demikian, wakil rakyat bukan lagi sebuah "frase" yang berarti wakil bagi rakyat dalam menyuarakan aspirasi mereka, tetapi hanya sekadar "kata majemuk" yang menunjuk kepada para pejabat negara yang berkantor di Senayan, dan sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan suara rakyat jelata. Oleh karena itu, wajar saja bila pada bait pertama ini Trio Bimbo mengatakan bahwa *kurang peka perasaan* merupakan salah satu cara untuk menjadi wakil rakyat.

Adapun pada bait kedua, Trio Bimbo menyinggung tentang wacana kenaikan gaji para anggota legislatif serta para eksekutif negara sekaligus. Mereka yang duduk di kalangan legislatif, selaku pembuat Undang-Undang dengan seenaknya menaikkan gaji sendiri tanpa melihat seberapa baik hasil kinerja mereka. Hal ini pun akhirnya menimbulkan suara dari Presiden SBY, selaku eksekutif negara yang tidak pernah mendapat kenaikan gaji selama masa kerjanya. Bahkan, belakangan muncul gerakan dari rakyat yang mengumpulkan uang koin untuk diberikan kepada Presiden SBY. Sebetulnya, ini adalah simbol penghinaan kepada pemerintah SBY yang dianggap kurang mampu mensejahterakan rakyat, tetapi meminta kenaikan gaji. Beda halnya dengan aksi sejuta koin yang dikumpulkan rakyat untuk Prita, salah satu korban malpraktek

kedokteran di Omni International Hospital, yang melayangkan uneg-unegnya di dunia maya, lalu dituntut oleh pihak rumah sakit tersebut.

Terkait dengan kenaikan gaji yang dilakukan oleh para legislatif di atas, wajar bila Trio Bimbo memberi mereka gelar dengan *pelawak politik*. Baginya, ini adalah sebuah lelucon yang keluar dari kalangan legislatif, mengingat hasil kinerja mereka yang tidak maksimal, tetapi mereka meminta kenaikan gaji yang undang-undangnya dibuat oleh mereka sendiri. Padahal, gaji yang mereka terima adalah uang rakyat yang sudah semestinya kembali kepada rakyat, bukan kepada wakil rakyat sebagai makna "kata majemuk".

Sementara itu, pada bait ketiga, Trio Bimbo menyentil para legislatif yang dalam proses sidang di Gedung DPR selalu tidur pulas tanpa berpartisipasi aktif dalam prosesi rapat tentang kenegaraan tersebut. Meskipun demikian, tidak sedikit pula dari mereka yang ikut bersuara dalam sidang. Namun, jika dilihat dari perilaku mereka ini, tentunya ini adalah suatu hal yang tidak layak dilakukan oleh wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat. Dalam baitnya, Trio Bimbao mengungkapkan bahwa mereka *duduk sidang terus mimpi*.

Adapun dalam bait keempat lagu ini, Trio Bimbo menyindir kiprah pemerintah yang berusaha menggoyang keberadaan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sebuah lembaga negara dalam bidang yudikatif yang bertindak mengadili pelanggaran tindak pidana korupsi. Untuk membersihkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari praktik-praktik korupsi, keberadaan lembaga negara ini sangat diperlukan. Dan, mengingat prestasinya dalam memberantas korupsi di negeri ini, kiranya lembaga negara ini perlu mendapat acungan jempol. Namun, banyak pejabat yang merasa was-was dengan kehadirannya, sehingga lagi-lagi

pembuat undang-undang di kalangan legislatif mencoba untuk meniadakan keberadaannya.

Sungguh sebuah fenomena *pamer kekuasaan* yang dilakukan oleh legislatif untuk mengusir lembaga yudikatif seperti KPK dari NKRI, yang dalam bahasa Trio Bimbo dikatakan

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
untuk pamer kekuasaan,
salah satunya usir KPK dari senayan*

Perkataan-perkataan yang pedas pada keempat bait di atas, yang khususnya dikonstruksi untuk menyentil para elit legislatif, tetap tidak membuat pemerintah mampu menjerat penciptanya dengan pasal-pasal pidana. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam mengkonstruksi wacana bahasa yang demikian terletak pada rakyat yang diwakili oleh suara Trio Bimbo. Ini membuktikan bahwa kekuasaan menurut Foucault tidak bersifat vertikal, tetapi dapat muncul secara horizontal dalam wilayah kecil.

Jika mengingat suara-suara seperti ini pada masa pemerintahan Orde Baru, tentu akan menjadi sebuah masalah besar bagi yang menyuarakannya. Ini dianggap sebagai sebuah tindak pidana dengan tuntutan atas penghinaan terhadap pemerintah. Pada masa ini, rakyat tidak memiliki kekuasaan dalam mengkonstruksi bahasa yang mereka inginkan. Wacana bahasa masih terpaku pada kekuasaan pemerintah.

Pada era orde baru, istilah "korupsi" tidak pernah disuarakan, meskipun dalam praktiknya sudah terbukti. Sebagai kata untuk memperhalus dan menutupi kebobrokan perilaku pemerintah, media masa baik cetak maupun elektronik hanya

diperbolehkan menggunakan istilah "kesalahan prosedur". Selain itu, dinamainya gerakan masyarakat di Aceh (GAM: Gerakan Aceh Merdeka) dengan sebutan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), juga merupakan strategi sarkasme yang diterapkan pemerintah terkait dengan tujuan politis tertentu. Penamaan GAM menjadi GPK disadari akan mampu membentuk opini publik untuk bersikap anti terhadap kelompok bersangkutan. Jika dikemudian hari ada usaha pembunuhan terhadap kelompok tersebut, tentu publik akan mensejajarkannya dengan tindakan penumpasan terhadap para perusuh, pengacau, dan penjahat.¹¹

Adapun pada era reformasi sekarang, wacana yang digunakan rakyat dalam membahasakan suara hati mereka amat terlihat bebas, tidak dikungkung oleh kekuasaan pemerintah. Rakyat sudah memiliki kekuasaan untuk membuat wacana bahasa, tanpa harus berhadapan dengan meja hijau.

Pada bait kelima lagu ABC karya Trio Bimbo ini, ia menyindir tentang perilaku terpidana kasus korupsi di Direktorat Pajak, yakni Gayus Tambunan, yang bebas keluar masuk penjara selama masa tahanan menjadi sorotan juga dalam lirik lagunya.

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
untuk menjadi mafia,
salah satunya memakai wig dan kacamata*

Dalam bait ini, Trio Bimbo menyindir Gayus Tambunan yang menjadi mafia pajak dengan mendeskripsikan penampilan fisiknya ketika melenggang keluar dari hotel prodeo guna menyaksikan pertandingan tenis Internasional di Bali. Ini secara tidak langsung menyinggung

¹¹ Moch. Jalal, "Praktik Diskursif *the Theory of Thruth* Michel Foucault dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa Indonesia. Dalam <http://www>.

para pelaksana hukum di negeri ini yang mudah disuap oleh seorang terdakwa maupun terpidana. Alangkah lemahnya aparat penegak hukum di negeri ini yang rela mengorbankan harga dirinya dengan sedikit rupiah.

Lagi-lagi, wacana yang disuarakan oleh Trio Bimbo di atas dalam mengkritisi moral penegak hukum di Indonesia terlihat begitu lugas, meskipun dengan bahasa yang diperhalus. Memang, hanya konteks situasi hukum di Indonesia dewasa ini yang mampu memaknai lirik lagu di atas, tetapi setidaknya ada kekuasaan yang muncul dari pengetahuan yang dimiliki rakyat untuk membentuk sebuah wacana yang mampu menyuarakan hati rakyat jelata.

Pada lirik lagu berikutnya, Trio Bimbo membuat sebuah wacana bahasa yang menyindir para penguasa yudikatif di Indonesia. Dalam hal ini, jaksa dan hakim yang bertugas sebagai penyelenggara yudikatif negara. Dalam liriknya, Trio Bimbo mengatakan,

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
jaksa hakim wiraswata,
salah satunya mengurus kantong terdakwa*

Jelas, makna dari lirik lagu di atas bahwa penyelenggara hukum negara ini berupaya memperkaya diri dengan cara memeras para terdakwa agar kasusnya dihapus atau tuntutan hukumannya diminimalisir. Meskipun yang disindir secara langsung oleh Trio Bimbo ini jelas, yaitu para hakim dan jaksa yang mengetahui secara pasti permasalahan hukum, tetapi mereka tetap tidak memperkarakan Trio Bimbo ke meja hijau sebagai kasus mencemarkan nama baik seseorang atau institusi hukum.

Dari sini dapat dilihat bahwa kekuasaan dalam mengkonstruksi sebuah wacana dapat berasal dari rakyat, bukan dari

pemerintah atau institusi. Dan, pemerintah pun tidak kuasa membendung wacana-wacana bahasa yang demikian kritis terhadap tubuh pemerintahan.

Tidak hanya jaksa dan hakim yang menjadi korban sentilan Trio Bimbo dalam lirik ABC-nya. Pada bait berikutnya, Trio Bimbo juga menyentil para pengacara yang gigih membela kliennya yang sedang menjadi terdakwa, tetapi sebenarnya kegigihan yang dilakukan oleh sang pengacara tidak lain karena disuplai dana dari terdakwa yang menjadi kliennya tersebut. Semakin besar suplai dana dari sang klien, semakin gigih pula ia mencari kata-kata agar sang klien mendapat pengurangan hukuman atau dianggap tidak bersalah. Demikianlah fenomena dunia advokasi yang terjadi di tubuh hukum Indonesia, yang dipaparkan oleh Trio Bimbo dalam baitnya berikut.

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
jadi pengacara terpuji,
salah satunya menyeringai tarifnya tinggi*

Pada bait berikutnya, Trio Bimbo memberi nasihat kepada bangsa Indonesia tentang bagaimana cara menyelamatkan negeri Indonesia yang sedang sakit ini. Yakni, dengan menyembuhkan para elit politik yang sakit jiwa. Hal ini ia lukiskan dalam baitnya.

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
menyelamatkan Indonesia,
salah satunya sembuhkan elit yang sakit jiwa*

Ketika memvisualisasikan bait di atas dalam bentuk video klip, yang divisualisasikan adalah para elit politik di dalam ruang sidang kenegaraan yang saling adu jotos mempertahankan egonya masing-masing. Trio Bimbo dengan lugas memvonis mereka sebagai elit politik

yang "sakit jiwa" dan harus segera disembuhkan demi menyelamatkan negeri Indonesia tercinta, mengingat sebenarnya di tangan merekalah nasib bangsa Indonesia ini.

Demi mendengar perkataan demikian, para elit politik hanya mampu mendindingkan telinganya yang panas tanpa kuasa memejahijaukan Trio Bimbo. Ternyata, di tangan musisi, sebagian wacana bahasa yang tersebar di Indonesia dapat memiliki kekuasaan yang tidak tergoyangkan oleh elit politik sekalipun.

Dalam bait terakhir lagu ABC ini, Trio Bimbo menjadikan oknum polisi sebagai objek sindirannya pula. Dalam baitnya dikatakan,

*ABC (Ada Banyak Cara) ...
polisi jadi teladan,
akal-akalan jadi kehilangan akal*

Bait ini secara umum menyindir para pejabat Polri yang selalu berkelit dari keterlibatannya pada kasus-kasus yang sedang marak di Indonesia. Bahkan, mereka seolah-olah menjadi pahlawan dengan cara mengungkap praktik-praktik korupsi yang terjadi dewasa ini. Padahal, fakta menunjukkan mereka juga terlibat isu markus (makelar kasus) yang semakin trend di dunia hukum Indonesia. Frase *kehilangan akal* digunakan Trio Bimbo untuk mengkritisi mereka yang bekerja di tubuh Polri, dan meskipun frase ini cukup menukik hati para polisi, tak satu pun pihak kepolisian berani membelenggu tangan ketiga pasang tangan Trio Bimbo, serta penulis lirik lagunya. Ini menunjukkan bahwa wacana bahasa yang ada di Indonesia tidak lagi berada dalam kekuasaan pemerintah, melainkan dalam kekuasaan rakyat.

Penutup

Setelah melakukan pembacaan terhadap lirik lagu ABC (Ada Banyak Cara)

karya Trio Bimbo dengan menggunakan analisis wacana Michel Foucault di atas, dapat dibuktikan bahwa kekuasaan dalam mengkonstruksi sebuah wacana bahasa berasal dari rakyat, bukan dari pemerintah. Ini terlihat dari bait-bait "pedas" yang disuarakan oleh Trio Bimbo dalam mengkritik seluruh jajaran pejabat pemerintah. Para pejabat pemerintah tersebut, baik dari kalangan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak kuasa memperkarakan wacana kebahasaan ini.

Berbeda halnya dengan masa pemerintahan Orde Baru, untuk mengkonstruksi simbol-simbol dan wacana bahasa harus sesuai dengan yang diinginkan oleh penguasa, dalam hal ini pemerintah. Jika tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, hukuman pidana atau hukuman tembak mati secara misterius pun dilakukan. Foucault benar-benar percaya akan kemampuan yang dimiliki penguasa dalam mengkonstruksi serta menciptakan subjek-subjek tertentu melalui kekuasaan yang dimilikinya.

Namun demikian, Foucault pun mengatakan bahwa sebenarnya kekuasaan itu tidak melulu berpihak pada pemerintah. Akan tetapi, ia dapat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Terlebih lagi kekuasaan dalam mengkonstruksi sebuah wacana kebahasaan yang ada pada lagu ABC karya Trio Bimbo di atas. Pemerintah tidak memiliki kuasa untuk membendung arus deras kritikan yang terdapat dalam bait-bait lagu tersebut.

Inilah gambaran salah satu wacana kebahasaan yang terjadi pada masa reformasi, pada masa ini tidak ada paksaan sama sekali dalam hal pengendalian wacana kebahasaan. Rakyat lah yang berkuasa mengendalikan bahasa mereka sesuai dengan keinginan yang mereka miliki, tanpa ada instruksi dari pemerintah.

Bacaan

Moch. Jalal, "Praktik Diskursif *the Theory of Thruth* Michel Foucault dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa Indonesia. Dalam [http.www](http://www).

Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik* (Jakarta: PT Gramedia, 2001)

Mudjio Rahardjo, "Analisis Wacana dalam Studi Keislaman" dalam http://mudjiarahardjo.com/artikel/230-analisis-wacana-dalam-studi-keislaman-sebuah-pengantar-awal.html#_ftn8 diakses tanggal 31 Desember 2010.

Gillian Brown dan George Yule. *Analisis Wacana*. Terjemah *Discourse Analysis* oleh I Sutikno (Jakarta: PT Gramedia, 1996)

Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: Lkis, 2001)

Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terjemahan oleh Moechtar Zoerni dari buku asli *The Archeology of Knowledge*, Yogyakarta: Qalam, 2002.

Melani Budianta, "Teori Sastra Sesudah Strukturalisme dari Studi Teks ke Studi Wacana Budaya", artikel dalam Bahan Pelatihan Teori dan Kritik Sastra, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.

Mh. Nurul Huda, "Ideologi Sebagai Praktek Kebudayaan", artikel dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, Edisi Th.XXVII No.3/2004.